

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MEMBANGUN SDM PROFESIONAL DI PERGURUAN TINGGI: KASUS *ACADEMIC DISHONESTY* STIE PERBANAS

Adi Susilo Jahja

E-mail: susilohj@gmail.com, STIE Perbanas, Jl. Perbanas, Kuningan Setiabudi, Jakarta 12940

Abstract: This article reviews the academic integrity at STIE Perbanas based on the case of academic dishonesty having occurred at the institution. Kohlberg's concepts of stages in moral development are used to highlight the case review, indicating the mutual relationship between lecturers, students, and administrative staff in running a better academic atmosphere. At the end, it is suggested that all the three university elements obey both legal compliance and ethical compliance in their achievement of academic integrity.

Keywords: sumber daya manusia, pendidikan, perkembangan moral, integritas akademik.

Menyontek adalah salah satu fenomena pendidikan yang sering dan bahkan selalu muncul menyertai aktivitas proses pembelajaran sehari-hari, tetapi jarang menjadi pembahasan dalam wacana pendidikan di Indonesia. Kurangnya pembahasan mengenai hal ini mungkin disebabkan karena kebanyakan pakar menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang sifatnya sepele, padahal masalah menyontek sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat mendasar (Alhadza, 2001).

Dalam sebuah diskusi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta dikatakan bahwa pelanggaran kode etik ilmu pengetahuan di Indonesia sudah mengkhawatirkan karena tidak hanya dilakukan mahasiswa atau peneliti pemula saja, melainkan juga peneliti setingkat doktor. Kasus pelanggaran kode etik yang paling sering terjadi adalah penjiplakan karya orang lain atau plagiarisme (Kompas, 18 Desember 2002).

Mahasiswa hari ini adalah pemimpin masa depan. Mereka akan berperan pada berbagai sektor kehidupan. Etika akademik mahasiswa menjadi hal yang penting untuk dikaji dengan alasan: Pertama, karena keyakinan yang mereka anut akan mempengaruhi nilai-nilai etika dalam berbagai lapangan pekerjaan di masa datang. Kedua, persepsi mahasiswa terhadap nilai etika akan mempengaruhi tindakan mereka nantinya (lihat Lawson, 2004)

Untuk itu persoalan integritas akademik menjadi penting untuk dibahas. Integritas akademik pada dasarnya adalah bahwa seluruh hasil karya ilmiah

adalah pekerjaan orisinal mahasiswa, serta memberikan penghargaan terhadap seluruh sumber pustaka yang digunakan. Perilaku etis merupakan tanggung jawab seluruh anggota komunitas perguruan tinggi. Pelanggaran terhadap integritas akademik merupakan kejahatan yang serius (Sanders, 2004; Rutgers, 1997).

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan tinggi tentunya berkepentingan terhadap tercapainya tujuan pendidikan, antara lain yaitu "menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional serta/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi" (Statuta STIE Perbanas, Pasal 4 ayat 2). Adapun kepada segenap warga STIE Perbanas yang berarti dosen, mahasiswa dan karyawan, dalam berperilaku dijiwai oleh nilai-nilai luhur yang mengutamakan: (1) kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, (2) disiplin, (3) toleransi serta saling menghormati, (4) kejujuran dan integritas, dan (5) iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Statuta STIE Perbanas, Pasal 3 ayat 3).

Tulisan ini membahas tentang bagaimana persoalan integritas akademik di STIE Perbanas, bertitik tolak dari kasus pelanggaran akademik yang terjadi pada saat ujian akhir semester bulan Desember 2005. Melalui pembahasan ini penulis bermaksud mengusulkan kebijakan institusionalisasi nilai-nilai etika akademik pada STIE Perbanas.

Salah satu tujuan pendidikan STIE Perbanas adalah menyiapkan peserta didik sehingga memiliki kemampuan profesional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) dikatakan bahwa profesionalisme adalah mutu dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari sekedar hal-hal yang bersifat teknis. Bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan (Hasan, 2003). Secara garis besar profesionalisme tidak terlepas dari beberapa aspek penting yang saling terkait satu sama lain, yakni aspek pengetahuan (*knowledge*), aspek keterampilan (*skill*) serta integritas atau sikap mental (Moeliono, 2003; Kirnadi, 2005).

Pengetahuan diperoleh dari proses pembelajaran di bangku kuliah, dan/atau lewat berbagai wahana pendidikan lainnya, sedangkan keterampilan didapat setelah pengetahuan itu dikonversikan dalam bentuk aplikasi pekerjaan sehari-hari. Sikap mental memiliki catatan khusus yang melekat dalam diri profesional sejati. Yakni sikap terbuka terhadap pendapat ataupun nilai-nilai baru yang positif, menerima perbedaan pendapat, serta berlaku jujur. Kredibilitas dan integritas pribadi merupakan unsur penting dalam profesionalisme. Seseorang boleh saja pintar dan terampil tetapi kalau secara etik dan moral ia tidak bisa dipercaya, maka ia tidak layak disebut profesional. Kemampuan dan kredibilitasnya akan terus diuji dan ditempa di lingkungan kerja, lingkungan sosialnya, serta dalam pergaulan antarmanusia dan antarbangsa (Kirnadi, 2005).

Kata integritas berasal dari bahasa latin integer yang berarti keseluruhan, lengkap atau sempurna. Menurut kamus Oxford Dictionary (2000) integritas berarti “*quality of being honest and having strong morality*”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) mendefinisikan integritas sebagai “mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.” Webster’s Dictionary mendefinisikan integritas (2003) sebagai “*uprightness, soundness of character, moral wholeness*” Kata sinonimnya adalah kejujuran, ketulusan, kebersihan hati, kemenyeluruhan (*entirety*), lengkap, kemurnian. Wikipedia (2006) mengemukakan bahwa “*Integrity comprises the personal inner sense of “wholeness” deriving from honesty and consistent uprightness of character*”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat kita katakan bahwa integritas merujuk pada kualitas keutuhan moralitas pada diri seseorang, sehingga orang tersebut senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai moral, bersifat jujur, tulus dan ikhlas, konsisten antara perkataan dengan perbuatan.

STIE Perbanas merupakan organisasi yang memberikan pelayanan bidang pendidikan. Sebagaimana organisasi lainnya, merupakan kumpulan manusia yang melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat dinilai dari sudut pandang moral sebagaimana juga kegiatan manusia yang lainnya. Hubungan antara organisasi dengan moralitas lebih dalam lagi. Sebagai contoh, manajemen mengharapkan pegawainya tidak mencuri dari organisasi; pihak-pihak yang terlibat kontrak diharapkan memenuhi janjinya; konsumen berharap produk yang dibelinya sesuai dengan janji pada saat promosi; pegawai melaksanakan tugas dengan jujur tanpa berlaku curang. Orang yang bekerjasama diharapkan agar mitranya berlaku jujur, saling menghormati dan melakukan pekerjaan sesuai janji. Apabila setiap pihak dalam kegiatan ini baik itu konsumen, penyedia jasa, produsen dan pekerja melakukan tindakan yang tidak bermoral maka kegiatan ini akan terganggu. Dengan demikian moralitas merupakan pelumas yang memperlancar usaha, tetapi juga merupakan perekat bagi masyarakat (lihat De George, 1999: 12).

Antara istilah moral dengan etika seringkali digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. Keduanya berasal dari dua asal kata yang berbeda, tetapi mempunyai arti yang sama. Etika berasal dari kata *ethos*, sebuah kata Yunani, sedangkan moral asal katanya adalah *moralis*, sebuah kata Latin. Keduanya bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*custom* atau *mores*), tapi kemudian etika atau *ethics* berkembang artinya menjadi sebuah kajian filsafat atau ilmu tentang moral atau moralitas (Rahardjo, 1990: 3). Dalam berbagai literatur istilah moral didefinisikan sebagai standar bagi individu maupun kelompok dalam menilai antara yang benar dengan yang salah atau antara yang baik dengan yang buruk.

Apabila lembaga pendidikan hendak membentuk manusia yang memiliki integritas moral, maka tentu saja diperlukan perangkat peraturan yang menghukum tindakan-tindakan pelanggaran etika. Mahasiswa harus disadarkan tentang pentingnya nilai-nilai etika dalam kehidupan akademi. Sumber daya manusia yang menegakkan aturan tersebut tentunya juga harus memiliki integritas.

Tabel 1. Etika Selama Menjadi Mahasiswa dan Menjadi Pekerja

Studi	Hasil Studi
1. Sierles, Hendrickx, and Circle (1980)	Mahasiswa yang menyontek semasa kuliah, akan cenderung melakukan pemalsuan catatan pasien di klinik.
2. Hubert (1985)	Terdapat korelasi yang signifikan antara ketidakjujuran (<i>dishonesty</i>) dalam kelas dengan perilaku klinis yang tidak etis di antara mahasiswa keperawatan
3. Sims (1993)	Terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah dan derajat kecurangan sebagai mahasiswa dan sebagai pekerja
4. Ferrell and Daniel (1995)	Mahasiswa yang tidak menghargai perilaku etika di kampus tidak dapat diharapkan akan menghargai etika dalam hubungan pribadi dan profesional pada masa yang akan datang
5. Nonis and Swift 2001; Smith et al. 2002	Mahasiswa yang secara akademis tidak jujur seringkali akan mentransfer perilaku ini ke dalam dunia kerja setelah lulus
6. Davis and Ludvigson, 1995	Perilaku menyontek pada masa lalu merupakan peramal yang kuat terhadap perilaku menyontek pada masa yang akan datang
7. Nonis and Smith, 2001; Crown and Spiller, 1998; Sims, 1993	Menyontek di perguruan tinggi berkorelasi positif dengan perilaku tidak etis di tempat kerja
8. Sims, 1993; Whitley & Keith-Spiegel, 2001	Mahasiswa yang terlibat dalam perilaku menyontek di <i>college</i> tidak hanya akan sering menyontek pada pendidikan pasca dan profesional, tetapi juga cenderung akan terlibat dalam praktek bisnis yang tidak etis.
9. Blankenship & Whitley, 2000	Ketidakjujuran akademik terkait dengan perilaku menyeleweng seperti pencurian kecil-kecilan dan berbohong kepada orang lain
10. Whitley & Keith-Spiegel, 2001	Mahasiswa yang menyontek/curang (<i>cheat</i>) di <i>college</i> juga akan berbuat serupa dalam berbagai aspek kehidupan mereka yang lain
11. Lawson, 2004	Ditemukan hubungan yang kuat antara keyakinan etika mahasiswa dalam bidang akademik dengan perilakunya pada dunia usaha. Nampaknya kecenderungan untuk melakukan <i>cheating</i> dalam bidang akademik berkaitan dengan etika mahasiswa secara keseluruhan.
12. Professor Miguel Roig (New York Times 2002, p. 26)	"Mahasiswa yang menyontek di <i>college</i> cenderung akan menyontek di pendidikan pasca ataupun pendidikan profesional serta akan terlibat lebih buruk dalam praktek-praktek di tempat kerja"

Sumber:

Brown, B.S. & Choong, P. (2005, 201); Chapman, K.J., Davis, R., Toy, D. & Wright, L. (2004, 236); Smith, K.J., Davy, J.A. & Easterling, D. (2004, 63); Wright, T.A. (2004, 289); Lawson, R.A. (2004, 189).

Perbuatan curang dalam proses pembelajaran akan merugikan bagi kredibilitas lembaga. Sesungguhnya perbuatan curang ini dapat terjadi tidak hanya dalam proses ujian tapi juga dalam administrasi akademik, misalnya jika terjadi manipulasi nilai yang dilakukan oleh tenaga administrasi. Perguruan tinggi amat dirugikan dengan lulusannya yang memiliki nilai akademik tinggi tetapi ternyata tidak bermutu. Pada kasus sebuah perguruan tinggi pada masa yang lalu, karena praktik ini telah menjadi amat dikenal oleh mahasiswa, maka terjadi penyebaran berita dari mulut kemulut. Akibatnya perguruan tinggi tersebut menjadi terkenal di masyarakat karena ijazah palsu, atau karena nilai yang mudah diperjual-beli-

kan. Maka berlakulah sanksi sosial. Beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa yang menceritakan kepada penulis bahwa dalam iklan lowongan kerja sebuah surat kabar, dituliskan pengecualian terhadap lulusan perguruan tinggi tertentu.

Perbuatan curang tidak hanya merugikan perguruan tinggi, tetapi juga merugikan mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran dengan penuh kejujuran. Mereka yang telah bekerja keras akan sangat kecewa jika dihargai sama atau lebih rendah dari mereka yang mencari jalan pintas. Pada hakikatnya perbuatan curang itu juga merugikan mahasiswa yang melakukan kecurangan itu sendiri. Mereka telah merampas pengetahuan yang harusnya mereka

dapatkan, juga pengalaman dalam pembelajaran, sesuatu yang harusnya amat berharga yang dapat mereka tawarkan kepada bursa kerja. Lulusan yang tidak memiliki integritas itu akan meramaikan pasaran tenaga kerja. Bisa jadi mereka diterima dalam lapangan pekerjaan, namun lapangan pekerjaan itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak bermoral, yang pastinya berpotensi menyebabkan kerusakan lebih lanjut (lihat Washington University, 2004).

Kepedulian terhadap perilaku curang dalam kehidupan akademik menjadi perhatian kita karena dikhawatirkan hal ini akan terbawa pada kepribadian mahasiswa hingga mereka meninggalkan kampus. Berbagai studi yang mengkaji hubungan antara perilaku tidak etis/curang dalam kehidupan akademik ketika di kampus dengan ketika di lapangan pekerjaan menunjukkan hal-hal sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Pendidikan moral merupakan topik yang semakin populer dalam bidang psikologi dan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh karena banyaknya kejadian kriminal, kehamilan usia muda maupun bunuh diri di masyarakat, disadari hal ini juga disebabkan oleh karena masalah-masalah sosial yang kompleks. Di Amerika terdapat kecenderungan pemikiran yang makin menguat tentang perlunya pendidikan moral di sekolah untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut, meski hal ini masih merupakan obyek kontroversi. Namun penelitian yang sistematis tentang perkembangan moral telah berkembang pesat pada abad ini (Nucci, 2002).

Konsep perkembangan moral inipun diterapkan dalam organisasi perusahaan, sebagaimana tampak, jika kita amati dalam buku-buku tentang etika bisnis ataupun jurnal-jurnal ilmiah tentang bisnis.

Penelitian-penelitian psikologi menunjukkan bahwa manakala seseorang semakin dewasa maka nilai-nilai yang mereka anut juga semakin mendalam. Penelitian Lawrence Kohlberg menyimpulkan ada enam tahap perkembangan moral yang dialami oleh seseorang ketika berinteraksi dengan masalah-masalah moral. Urutan keenam tahapan itu sebagai berikut (dalam Velasquez 2002, p.27-33).

Tahap Prakonvensional. Pada tahap ini seorang anak dapat merespon aturan dan harapan sosial dan bisa membedakan antara baik, buruk, benar dan salah. Aturan-aturan tersebut adalah sesuatu yang dikenakan dari luar terhadap dirinya. Benar dan salah dipahami sebagai sesuatu yang menyenangkan atau menyakitkan sebagai bentuk hukuman dari orang-orang yang membuat aturan. Misalnya seorang anak berumur 5 tahun ditanya apakah mencuri itu salah, ia akan menjawab bahwa jika mencuri akan dihuk-

kum oleh ibunya. Seorang anak akan melihat hanya dari sudut pandang dirinya (*self-centered*)

a. Tingkat Satu: Orientasi Hukuman dan Ketaatan (*Punishment and Obedience*)

Pada tingkat ini seorang anak melakukan perbuatan yang benar hanya karena untuk menghindari hukuman. Kesadaran bahwa ia harus berbuat sesuai keinginan orang lain masih rendah.

b. Tingkat Dua: Orientasi Alat dan Relativitas (*Instrument and Relativity*)

Dalam tingkat ini tindakan yang benar merupakan alat untuk memuaskan kebutuhannya serta kebutuhan orang-orang yang mengasuhinya. Ia mulai sadar bahwa ia harus berbuat sesuai dengan keinginan orang lain.

Tahap Konvensional. Memenuhi harapan keluarga, teman sejawat atau bangsa sekarang dipandang sebagai sesuatu yang bernilai, apapun konsekuensinya. Pada tahap ini seseorang tidak saja bertindak sesuai dengan harapan kelompoknya tetapi juga loyal terhadap kelompok dan norma-normanya. Pada tahap ini ia dapat memandang dari sudut pandang pihak lain dalam keluarga, teman-teman sejawat, organisasi, bangsa dan kelas sosialnya. Ia termotivasi untuk sesuai dengan norma-norma kelompoknya dan meletakkan kepentingan kelompok diatas kepentingan pribadi.

c. Tahap Tiga: Orientasi Kerukunan Antar Pribadi (*Interpersonal Concordance*)

Perilaku yang baik pada tahap ini adalah untuk memenuhi harapan orang-orang yang membe-rihanya kesetiaan, kasih sayang dan kepercayaan, seperti keluarga maupun teman-temannya. Melakukan tindakan yang benar karena termotivasi oleh kebutuhan untuk dipandang sebagai orang yang baik menurut sudut pandangnya maupun sudut pandang orang lain.

d. Tahap Empat: Orientasi Hukum dan Ketertiban (*Law and Order*)

Benar ataupun salah pada tahap ini ditentukan oleh kesetiaan terhadap bangsa ataupun masyarakat sekitar. Ia memandang manusia sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar yang menentukan peran dan kewajiban.

Tingkat Pascakonvensional (*Postconventional*). Pada tingkat ini seseorang tidak begitu saja menerima nilai-nilai dan norma-norma kelompok dimana ia menjadi anggotanya. Ia mempertanyakan hukum-hukum dan nilai-nilai masyarakat dan melakukan definisi ulang dengan menggunakan prinsip moral yang menurutnya dapat dibenarkan secara rasional.

e. Tahap Lima: Orientasi Kontrak Sosial
Seseorang menyadari bahwa manusia memiliki pendapat dan pandangan pribadi yang satu sama lain bisa bertentangan dan menekankan pada pentingnya konsensus melalui kesepakatan, kontrak dan proses hukum. Ia menyadari bahwa seluruh nilai dan norma adalah relatif dan semuanya harus ditoleransi.

f. Tahap Enam: Orientasi Prinsip-prinsip Etika Universal

Pada tahap terakhir ini, suatu tindakan dikatakan benar bila didasarkan atas prinsip-prinsip moral yang dipilih karena komprehensif, universal dan konsisten secara logika. Prinsip-prinsip tersebut tidaklah konkrit seperti sepuluh perintah Tuhan, namun merupakan prinsip umum yang abstrak yang berkaitan dengan hal-hal seperti keadilan, kesejahteraan masyarakat, persamaan hak serta penghargaan terhadap derajat kemanusiaan. Alasan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu yang benar didasarkan atas komitmen terhadap prinsip-prinsip moral tersebut dan ia melihatnya sebagai kriteria untuk menilai seluruh aturan moral serta mengaturnya secara demokratis. Teori Kohlberg dapat diikhtisarkan dalam Gambar 1 sebagai berikut.

Berdasarkan keterangan Kohlberg di atas maka dapat diambil kesimpulan tentang mengapa karyawan suatu perusahaan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika disajikan pada Gambar 2.

METODE

Pembahasan ini didasarkan atas kasus pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan pengawas ujian pada bulan Desember 2005 yang ditangani oleh Tim Komisi Etik, dimana penulis menjadi salah satu anggotanya.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menurut Adler and Adler (O'Connor, 2006) merupakan "*a subjective methodology and yourself as the research instrument*". Paradigma yang digunakan adalah *interpretive research*. Menurut Schwandt *interpretive research* berkaitan dengan makna, mencoba untuk memahami pemaknaan yang dilakukan oleh anggota organisasi terhadap sebuah situasi (Swanson 2005, 19). Swanson (2005, 19) berpendapat bahwa peneliti *interpretive* mengasumsikan bahwa pengetahuan dan makna merupakan interpretasi individual. Oleh karenanya tidak ada pengetahuan yang obyektif yang dapat dipisahkan dari in-

terpretasi yang berasal dari penalaran individu. Wahyudi (2004, 101) mengemukakan:

A qualitative inquiry characterizes the involvement of an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. Within this perspective, a researcher studies "things in their natural settings, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them" (Denzin and Lincoln, 1998:3). Interaction between the researchers and that being researched becomes an important issue due to the demand for the researcher to become an "insider" where he or she collaborates, spends time in the field with participants in order to lessen distance between them (Creswell, 1998: 75). In other words the researcher has to get involved (Oldman, 1981: 237).

Metode yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah studi kasus. Scholz dan Tietje (Ellinger et. al, 2005: 328) mendefinisikan studi kasus sebagai "*an empirical inquiry that investigates a contemporary problem within its real-life context*". Yin (Ellinger et. al, 2005: 333) mengemukakan bahwa ada lima komponen penting dalam penelitian studi kasus: "*a study's questions; its propositions, if any; its unit(s) analysis; the logic linking the data to the propositions; and, the criteria for interpreting the findings*". Penelitian ini memperhatikan kelima komponen tersebut.

Dalam hal ini penulis melakukan observasi terlibat. Dalam posisi ini diharapkan peneliti memiliki kelebihan dalam menyampaikan penjelasan tentang bagaimana dan mengapa kasus itu terjadi. Disini penulis mengambil sudut pandang sebagai orang dalam (*emic*) dan bukannya orang luar (*etic*) (lihat Wahyudi 2004:115).

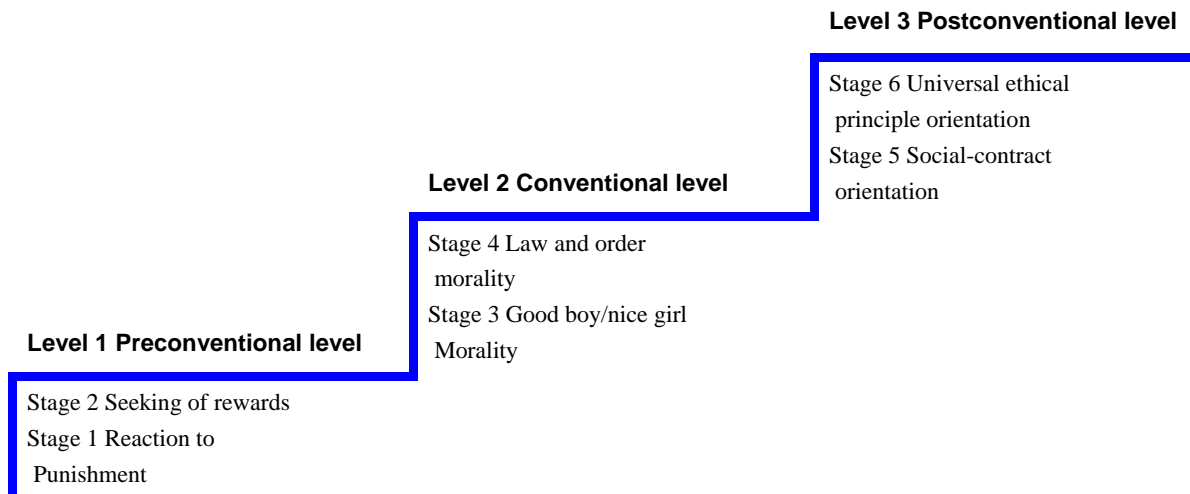
Pengumpulan data dilakukan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut, baik dosen, kolega dosen, mahasiswa dan pengawas. Persoalan yang ditanyakan kepada mereka adalah kronologi kejadian, alasan-alasan mereka melakukan pelanggaran akademik, konfirmasi ulang terhadap kesaksian yang berbeda, menanyakan kepada dosen yang terlibat mengenai kejadian ini.

Berdasarkan masukan informasi tersebut lalu Tim Komisi Etik merujuk pada aturan yang ada dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang memuat tentang kronologi peristiwa, pembahasan oleh Tim serta rekomendasi sanksi. Penulis terlibat aktif dalam semua kegiatan tersebut.

Focus: **Self**
Moral Reasoning:
Ego-Centered

Focus: **Others**
Moral Reasoning:
✓ **Society & Law-Centered**
✓ **Group-Centered**

Focus: **Humankind**
Moral Reasoning:
Principle-Centered



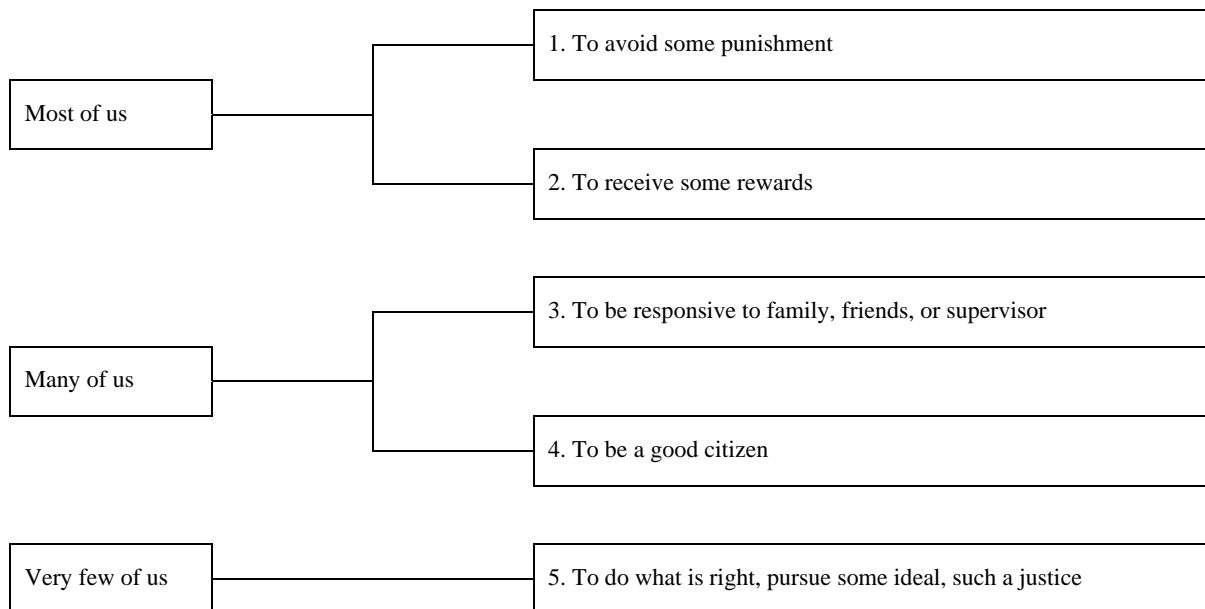
Sumber:

Carroll, A.C. & Bucholtz, A.K. (2003, 191).

Gambar 1. Perkembangan Moral (Kohlberg)

Dalam menganalisis data penulis berusaha memahami, bereaksi, berinteraksi, melakukan refleksi dan memaknai kejadian lalu mengaitkannya dengan

proposisi teori yang telah dijelaskan pada kajian literatur, serta bukti-bukti empiris yang menyertainya (lihat Wahyudi 2004: 124-125).



Sumber:

Carroll, A.C. & Bucholtz, A.K. (2003, 193).

Gambar 2. Mengapa Karyawan Bertindak Etis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat STIE Perbanas

STIE Perbanas Jakarta adalah lembaga pendidikan tinggi pertama yang menyelenggarakan pendidikan di bidang keuangan dan perbankan. Lembaga ini berawal dari Yayasan Pendidikan Perbanas (YPP) yang didirikan secara resmi sebagai badan hukum pada 19 Februari 1969. Saat itu YPP mendirikan Akademi Ilmu Perbankan, yang kemudian berkembang menjadi Akademi Akuntansi dan Perbankan dan kini menjadi STIE Perbanas Jakarta.

Saat ini STIE Perbanas memiliki dua jurusan, yaitu Jurusan Manajemen dan Jurusan Akuntansi. Pada setiap jurusan terdiri dari dua tingkat pendidikan, yakni Strata satu (S1) dan Diploma tiga (D3). Jurusan Manajemen dan Akuntansi S1 meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) sedangkan Jurusan Manajemen dan Akuntansi D3 meraih akreditasi B. Selain itu STIE Perbanas juga menyelenggarakan program Pascasarjana (MM) yang didirikan sejak 10 Desember 1999.

Kampus STIE Perbanas terletak di Jl. Perbanas Setiabudi Karet Kuningan Jakarta selatan. Dengan luas tanah 13.372 meter persegi. Seluruh bangunannya mencapai 22.820 meter persegi yang terdiri dari enam unit bangunan bertingkat. Secara keseluruhan jumlah mahasiswanya pada bulan Maret 2006 sekitar 5.419 orang, sebagian besar (89%) adalah mahasiswa S1 baik Manajemen (43%) maupun Akuntansi (46%), D3 Manajemen sebesar 4%, D3 Akuntansi 4% sedangkan program MM sebesar 3% (Laporan Akademik STIE Perbanas 2006).

Kasus Kecurangan dalam Ujian

Dalam pengalaman penulis sebagai dosen di STIE Perbanas sejak tahun 1990, mengamati dan mewawancarai banyak mahasiswa, tertangkap kesan kuat bahwa bagi sebagian mahasiswa menyontek adalah hal yang biasa. Perbuatan tersebut dilakukan dalam mengerjakan Pekerjaan Rumah, *quiz* maupun ujian. Apabila pengawasan dalam ujian kurang ketat, mereka berusaha untuk menyontek. Motivasi utama mereka adalah mendapatkan nilai yang tinggi tanpa usaha keras. Mereka sangat berharap agar dosen memberikan kebijaksanaan dalam memberi nilai. Apalagi bagi mahasiswa senior yang sudah mengulang mata kuliah beberapa kali, berusaha melakukan pendekatan kepada dosen agar dapat memberikan "kebijaksanaan" tersebut. Penulis beberapa kali menemukan lembar jawaban mahasiswa yang tidak menjawab dengan baik. Karena putus asa maka mahasiswa tersebut menulis permohonan untuk mendapat "kebijaksanaan" nilai.

Terjadinya pelanggaran akademik tidak terlepas dari peran ketiga unsur, yaitu mahasiswa itu sendiri, pengawas ujian serta dosen. Berikut ini adalah dua kasus pelanggaran akademik yang melibatkan mahasiswa, pengawas ujian dan dosen.

Kasus Manajemen Operasional Program S1 Jurusan Manajemen

Kasus pertama yaitu kasus pelanggaran akademik pada mata kuliah Manajemen Operasional. Diperoleh keterangan bahwa setelah selesai kuliah terakhir menjelang ujian akhir semester, beberapa mahasiswa meminta kepada dosen agar dapat dibantu dengan alasan sebagian dari mahasiswa sudah merupakan mahasiswa yang mengulang mata kuliah, serta ada yang mata kuliahnya sudah hampir habis, tinggal ujian skripsi. Permintaan tersebut disanggupi oleh dosen.

Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah UPM (Ujian Pengendalian Mutu), dimana korektornya terdiri dari dua dosen yaitu dosen yang bersangkutan dan dosen lain yang ditunjuk oleh lembaga. Tindak kecurangan dilakukan dengan cara membagi kunci jawaban kepada mahasiswa setelah ujian berlangsung. Mahasiswa dipesan oleh dosen agar dalam memperbaiki jawabannya jangan mirip dengan kunci jawaban. Namun kenyataannya karena keterbatasan penguasaan materi, mahasiswa tersebut tidak bisa menjalankan pesan dosennya. Dosen korektor kedua curiga terhadap lembar jawaban beberapa mahasiswa kemudian melaporkannya kepada lembaga.

Kasus Ujian Lab. Bahasa Inggris Program S1 Jurusan Manajemen

Beberapa mahasiswa yang sudah berulang kali mengikuti mata kuliah ini mengambil inisiatif untuk menghubungi pengawas, agar dalam mengawas ujian tidak terlalu ketat. Permintaan tersebut disanggupi oleh seorang pengawas yang juga alumni. Pengawas kedua adalah pegawai STIE Perbanas. Mereka mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak terlalu ketat karena merasa kasihan dengan mahasiswa.

Karena pengawasan yang sangat longgar maka mahasiswa leluasa bekerja-sama satu sama lain. Mereka menyontek kepada beberapa orang yang dikenal pintar. Setelah ujian selesai, dosen korektor curiga karena melihat nilai beberapa mahasiswa yang melonjak secara tidak wajar dibandingkan dengan tes *TOEFL* serupa sebelumnya. Setelah melakukan wawancara kepada para mahasiswa peserta ujian, dosen melaporkannya kepada lembaga.

Hasil Investigasi terhadap Kasus Pelanggaran Akademik

Lembaga membentuk Tim Komisi Etik yang diberi tugas untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi terhadap kasus tersebut. Disamping membaca laporan tertulis dan berbagai dokumen yang terkait, tim melakukan wawancara dengan melakukan pemanggilan terhadap dosen, pengawas dan mahasiswa.

Keterangan Dosen

Pemanggilan terhadap dosen mata kuliah Manajemen Operasional dilakukan dua kali secara tertulis, namun yang bersangkutan tidak hadir. Konfirmasi melalui telepon dilakukan hingga empat kali. Pada kali keempat yang bersangkutan diancam akan dilaporkan kepada yang berwajib jika tidak mau mengindahkan panggilan. Ia tertegun ketika diancam, dan menanyakan seberapa seriuskah permasalahan ini. Setelah dijelaskan bahwa masalah ini sangat serius karena menyangkut kredibilitas lembaga dan beritanya telah tersebar luas, barulah ia hadir.

Ketika berhadapan dengan tim, dosen tersebut langsung menceritakan kronologi kejadiannya serta memberikan alasan mengapa ia melakukan hal tersebut, yaitu pertama karena ditempatnya bekerja (sebuah bank) sangat sedikit mahasiswa STIE Perbanas yang diterima kerja. Kedua, ia ingin membantu mahasiswa agar IPKnya meningkat dan mudah mencari pekerjaan. Ketiga, ia beranggapan mata kuliah Manajemen Operasional ini adalah mata kuliah teknis yang tidak banyak digunakan dalam lapangan pekerjaan nantinya, khususnya dunia perbankan. Selanjutnya ia mengakui tindakannya itu salah dan memohon maaf kepada lembaga.

Tindakan tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara moral maupun aturan yang berlaku. Yang bersangkutan sesungguhnya menyadari hal ini. Terbukti bahwa menurut penuturan beberapa mahasiswa yang bersangkutan berpesan kepada mahasiswa ketika memperbaiki lembar jawaban ujian, agar menutup mulut dan jangan menceritakan peristiwa ini kepada siapapun juga. Tindakan ini jelas telah melanggar integritas keilmuan (*academic integrity*). Menurut Flinders University (2006) integritas keilmuan merupakan komitmen terhadap lima nilai dasar, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghargaan dan tanggung jawab. Integritas keilmuan menuntut kita untuk menunjukkan profesionalisme kita dengan bersikap jujur, dapat dipercaya dan bertindak dengan adil, rasa hormat dan tanggung jawab.

Wawancara yang dilakukan oleh tim dengan rekan dosen Manajemen Operasional lain serta koordinator mata kuliah tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan sebagai dosen tidak pernah ikut dalam rapat koordinasi mata kuliah. Yang bersangkutan berjalan sendiri, mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain. Tindakan ini disebut dengan *ethical egoism* (Barnett dan Schubert: 2002). Apabila dikaitkan dengan konsep Perkembangan Moral menurut Kohlberg, *ethical egoism* berada pada tingkat pra konvensional.

Keterangan Pengawas

Pengawas terdiri dari dua orang, yaitu alumni dan pegawai. Keduanya melonggarkan pengawasan dengan alasan bahwa mata kuliah ini sulit. Ketika ditanya oleh tim mengapa hal itu dilakukan, Pengawas pegawai mengatakan: "Tidak terlalu ketat dalam pengawasan karena Bahasa Inggris susah, ada yang mengulang sampai lima kali."

Sedangkan pengawas alumni sempat mengatakan kepada peserta ujian: "Boleh kerjasama asal tidak ketahuan aku." Bahkan ia menceritakan pengalamannya bahwa ketika menjadi mahasiswa, ia mengulang mata kuliah ini hingga tiga kali. Dalam melakukan pengawasan ia sempat mengatakan "Kerjasamanya jangan berisik lho, nanti saya ambil!" Yang bersangkutan juga mengakui bahwa ketika menjadi mahasiswa pernah melakukan kecurangan saat ujian.

Tim Komisi Etik (2006) berpendapat bahwa kedua pengawas memiliki kekeliruan pandangan dalam tolok ukur akademis, melalui pernyataan-pernyataannya yang memberi kelonggaran kepada mahasiswa dengan alasan mahasiswa sudah beberapa kali mengulang mata kuliah. Perilaku yang tidak etis ini mungkin menguntungkan mereka, karena dipandang sebagai pengawas yang "baik" oleh mahasiswa, namun jelas kepentingan pribadi yang bersifat jangka pendek ini telah merugikan kepentingan lembaga dalam jangka panjang (lihat Miao-Ling Fang, 2006).

Tim Komisi Etik (2006) mengatakan bahwa kerugian yang dialami oleh lembaga adalah (a) Nilai ujian *TOEFL* menjadi tidak valid, (b) tidak tercapainya tujuan program pendidikan di STIE Perbanas, khususnya pendidikan Bahasa Inggris dan (c) tindakan tersebut berpotensi meruntuhkan kredibilitas STIE Perbanas sebagai lembaga pendidikan yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai akademis yaitu kebenaran dan kejujuran. Hal ini dapat berakibat pada berkurangnya minat masyarakat calon mahasiswa maupun pengguna lulusan STIE Perbanas.

Tindakan mereka berdua tersebut juga dapat digolongkan sebagai tindakan *ethical egoism*. Menurut Barnett dan Schubert (2002), "*Ethical egoism suggests that individuals should make decisions based on what is best for themselves, without regard to others.*"

Keterangan Mahasiswa

Dari keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa mahasiswa yang terkait dengan kedua kasus ini, diperoleh hal-hal berikut: Pertama, mahasiswa berusaha mendapatkan bantuan kepada dosen untuk mendapatkan nilai yang baik. Hal ini terjadi pada mata kuliah Manajemen Operasional, dimana mata kuliah ini lebih menekankan pada metode kuantitatif; suatu hal yang dianggap sukar bagi kebanyakan mahasiswa.

Kedua, pada mata kuliah Lab. Bahasa Inggris, dimana bantuan dari dosen tidak didapatkan, mereka berusaha agar dapat menyontek kepada mahasiswa yang lebih pintar. Untuk itu mereka telah menghubungi pengawas agar melonggarkan pengawasannya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang "dita-kuti" oleh mahasiswa, terutama pada komponen nilai *TOEFL* yang merupakan salah satu komponen penilaian. Sudah banyak mahasiswa yang unggul mata kuliah ini karena nilai *TOEFL* yang rendah.

Namun yang menarik dari kedua peristiwa tersebut adalah, mahasiswa yang memiliki IPK yang tinggi juga terlibat dalam perbuatan curang tersebut. Diketahui salah seorang aktivis penerima beasiswa dengan IPK yang tinggi juga terlibat. Menarik jika diteliti lebih lanjut apakah antara perbuatan curang dengan IPK ada hubungannya atau tidak.

Menurut Lawson (2004), mahasiswa yang lebih berhasil akan lebih memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai etika, dimana terdapat hubungan positif yang signifikan antara IPK dengan keyakinan terhadap nilai-nilai etika. Sementara Brown (2005) mengemukakan:

Several researchers have found that students with lower GPAs cheat more than those with higher GPAs (Bunn, Caudill, & Cropper, 1992; Moffatt, 1990; Tang & Zuo, 1997). However, Whitley (1998) concluded that, overall, GPA has not been found to be related to cheating.

Lawson (2004) juga mengemukakan bahwa ada berbagai temuan yang berbeda tentang hubungan antara IPK dengan etika mahasiswa. Dikatakannya, "*research continues to find a significant negative relationship between cheating and G.P.A.*".

Hinman (2004) berpendapat bahwa mahasiswa menyontek karena bermanfaat bagi mereka. Nilai mereka tinggi dengan sedikit usaha, sementara mahasiswa yang jujur nilainya tidak tinggi, tidak mendapat peluang beasiswa, rekomendasi serta kemungkinan tidak diterima di pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu menurut Jordan (Smith, 2004), mahasiswa yang mengejar nilai akan cenderung menyontek dibandingkan dengan mahasiswa yang motivasinya adalah untuk belajar. Jordan mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku menyontek berkorelasi positif dengan tujuan memperoleh nilai atau peluang kerja, dan berkorelasi negatif dengan tujuan menguasai ilmu untuk pengembangan diri.

Pengalaman penulis menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa bila dalam ujian tidak diawasi dengan ketat, akan cenderung untuk menyontek. Oleh karena itu penulis sebagai dosen sering memberikan peringatan yang keras terhadap perbuatan menyontek, disertai dengan sanksinya bila terbukti. Dosen-dosen lain juga melakukan hal yang sama. Namun memang perlu dicermati lebih lanjut apakah dalam ujian akhir semester yang umumnya diawasi oleh pegawai maupun alumni hal ini juga dilakukan? Berdasarkan keterangan lisan yang penulis dengar, diketahui ada beberapa orang alumni ataupun pegawai yang bila mengawasi ujian, melakukannya dengan ketat dan tegas, meski ada juga yang tidak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alhadza (2001) pada tahun 1998, diperoleh temuan bahwa mahasiswa melakukan kecurangan dalam melakukan ujian, kemungkinannya disebabkan oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut.

1. Terpengaruh setelah melihat orang lain melakukan kecurangan meskipun pada awalnya tidak ada niat melakukannya.
2. Adanya peluang karena pengawasan yang tidak ketat.
3. Takut gagal, yang bersangkutan tidak siap menghadapi ujian tetapi tidak mau menundanya dan tidak mau gagal.
4. Ingin mendapatkan nilai tinggi tetapi tidak bersedia mengimbangi dengan belajar keras atau serius.
5. Tidak percaya diri, sebenarnya yang bersangkutan sudah belajar teratur tetapi ada kekhawatiran akan lupa lalu akan menimbulkan kefatalan, sehingga perlu diantisipasi dengan membawa catatan kecil.
6. Terlalu cemas menghadapi ujian sehingga hilang ingatan sama sekali lalu bertanya kepada teman yang duduk berdekatan.
7. Menganggap bahwa pendekatan pribadi kepada dosen lebih efektif daripada belajar serius.

8. Mengingat angkatannya sudah lanjut dan sudah pernah mengikuti mata kuliah tetapi gagal, mencari jalan pintas sehingga dapat lulus pada mata kuliah tersebut.

Berbagai penelitian yang dikutip oleh Gbadamosi (2004) menunjukkan alasan-alasan melakukan perbuatan curang, yaitu (1) keinginan untuk mendapatkan nilai tinggi, (2) kurangnya waktu belajar, (3) beban studi yang berat, (4) kecilnya risiko ketahuan, (5) berat-ringannya hukuman bila ketahuan melakukan pelanggaran, dan (6) adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Penelitian Chapman et al (2004) secara jelas menunjukkan bahwa para mahasiswa mengetahui apa itu *cheating* dan mereka meyakini bahwa hal itu merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Namun mereka tetap melakukan hal itu karena mereka pikir bahwa manfaatnya lebih besar dibanding dengan biayanya, dan mereka yakin bahwa itu merupakan "norma sosial".

Pada umumnya rasionalisasi yang digunakan mahasiswa atas perbuatan tersebut adalah (Wright, 2004) *pertama* perbuatan ini tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain (misalnya, "Menyontek tidak merugikan siapapun"), *kedua*, pengingkaran terhadap tanggung jawab pribadi (misalnya, "Dosen kita tidak peduli"), *ketiga*, pengingkaran terhadap risiko (misalnya, "Tidak satupun yang ketahuan"), *keempat*, *Selective morality* (misalnya, "Saya orang jujur, tapi dalam keadaan seperti ini saya harus menyontek"), *kelima* menyontek dipandang sebagai normal sosial (misalnya, "Jaman sekarang, setiap orang menyontek"). Penelitian Bernardi et al. (2004) menunjukkan bahwa perilaku menyontek tidak selalu berasosiasi dengan perkembangan moral. Pertimbangan-pertimbangan situasi yang spesifik dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan (melalui penalaran moralnya).

Menurut Alhadza (2001) mereka yang menyontek bukanlah karena naluri mereka telah tumpul dalam membedakan bahwa menyontek itu salah atau benar, bukan pula karena nalar moral mereka tidak tahu bahwa itu baik atau buruk, tetapi orang tersebut berada pada kondisi yang menuntut dirinya untuk menyontek. Isu moral memang bukan sekedar faktor pengetahuan dan penalaran yang mampu membedakan baik dengan buruk tetapi lebih erat terkait dengan faktor kondisional. Faktor kondisional adalah suatu keadaan yang memungkinkan, mengundang, dan bahkan memfasilitasi seseorang untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan ujian, faktor kondisional antara lain

mencakup tingkat kesulitan materi ujian, pentingnya mata kuliah, pengaturan tempat duduk, ketat-tidaknya pengawasan, instrumen evaluasi, cara penilaian, objektivitas, sikap atau cara penilai, besarnya kelas, dan sebagainya (Alhadza 2001; Chapman 2004).

Penelitian Thornton and Peterson tahun 2000 (Bernardi, et al., 2004) menemukan hal berikut:

students from a military academy are more likely to indicate an ethical violation for an act that is clearly forbidden by their honor code than students from a civilian college. These authors find that students rationalize their behavior by using logic at nearly all stage levels. In Stage Five, individuals who cheat do not believe the code of conduct is fair or that an equitable process was used in developing the rules. Finally, in Stage Six, students might cheat if they perceive the academic integrity codes as arbitrary, contradicting general principles of justice, or contrary to what rational people believe. Therefore, students' logic patterns should relate to their decision process about cheating.

Thomas A Wright (2004) dalam dialognya dengan salah seorang mahasiswa yang mengakui bahwa dirinya menyontek, mengatakan bahwa ia menilai mahasiswanya itu berada pada tingkat 5 atau 6 dari teori Perkembangan Moral Kohlberg. Hal tersebut setelah ia menangkap argumen panjang lebar dari mahasiswanya dan menyaksikan betapa dorongan nuraninya tersebut telah membuat mahasiswa itu mengaku.

Alasan mahasiswa tersebut adalah karena ia merasa tidak percaya diri dan ragu dengan kemampuannya mengerjakan ujian. Susah baginya menuangkan pikiran-pikirannya dalam situasi ujian. Disisi lain, ia harus mendudukkan dirinya sebagai orang yang kompeten dihadapan orang lain, yang dalam hal ini adalah dosennya. Ia harus mendapatkan respek dari dosennya. Untuk itu ia memutuskan membuat contekan. Namun kesadaran akan perbuatannya yang salah dan merugikan orang lain serta respek kepada dosennya itu telah mendorong dirinya untuk mengakui kesalahan.

Membentuk Ethical Climate dalam Lembaga Pendidikan

Bertitik-tolak dari kedua kasus pelanggaran akademik diatas, maka ada dua bidang yang perlu diperbaiki. Pertama adalah yang berkaitan dengan etika dosen dan karyawan, sedangkan yang kedua adalah yang berkaitan dengan upaya untuk menumbuhkan iklim etika akademik pada mahasiswa.

Strategi Integritas

Etika individu dalam organisasi bukanlah “*has nothing to do with management*”, tetapi “*has everything to do with management*” (Paine, 1994). Andrews (1989) mengemukakan bahwa perusahaan adalah organisasi dimana orang-orang didalamnya saling mempengaruhi untuk membuat nilai-nilai dan cara-cara melakukan sesuatu. Agar suatu organisasi dapat berjalan efektif, kekuasaan para pemimpin haruslah didukung oleh para pengikutnya. Kekuasaan pemimpin dalam memilih orang untuk ikut dalam tim lebih kuat ketimbang pemimpin yang dingkat setelah melalui pemilihan. Para anggota organisasi ini mengharapkan arahan dari pimpinannya meskipun sebenarnya mereka mungkin enggan untuk berubah. Manajemen yang malas atau ceroboh akan membiarkan organisasi berjalan menyimpang dari tujuan serta membiarkan etika berubah. Manajemen yang tegas akan berusaha mengatasi masalah-masalah etika dalam organisasi.

Paine (1994) mengemukakan bahwa dalam mengatasi persoalan etika, banyak organisasi menjalankan *compliance-based ethics program*. Mereka melakukan hal ini untuk mencegah, mendeteksi dan menghukum pelanggaran hukum. Namun perlu

disadari bahwa mengatasi persoalan pelanggaran etika dalam organisasi adalah lebih dari sekedar menghindari praktek-praktek ilegal dan menyediakan buku peraturan yang harus ditaati oleh para karyawan. Untuk menciptakan iklim yang menghasilkan perilaku teladan, diperlukan pendekatan komprehensif lebih dari sekedar sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Pendekatan berdasarkan integritas terhadap manajemen etika mengkombinasikan antara pendekatan hukum dengan penekanan pada tanggung jawab manajemen terhadap perilaku yang beretika. Manajemen memberikan panduan tentang nilai-nilai, aspirasi, pola pikir dan pola perilaku. Menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang beretika dan menanamkan rasa tanggung jawab diantara para pegawai. Kepatuhan pada hukum dipandang sebagai aspek positif dari kehidupan organisasi, bukan dipandang sebagai pembatasan. Jika kita melihat Gambar 2 tentang Mengapa Karyawan Bertindak Etis, maka pendekatan ketaatan hukum (*legal compliance*) hanya menyentuh butir nomor satu dan dua. Sedangkan pendekatan integritas (*ethical compliance*) mencakup butir nomor satu hingga nomor lima.

Tabel 2 menjelaskan perbedaan antara strategi integritas dengan strategi ketaatan hukum.

Tabel 2. Strategi Manajemen Etika

	Charateristics of Compliance Strategy	Charateristics of Integrity Strategy
Ethos	Conformity with externally imposed standard	Self-governance according to chosen standards
Objective	Prevent criminal misconduct	Enable responsible conduct
Leadership	Lawyer driven	Management driven with aid of lawyers, HR, others
Methods	Education, reduced discretion, auditing and controls, penalties	Education, leadership, accountability, organizational systems and decision process, auditing and controls, penalties
Behavioral Assumptions	Aotonomus, being guided by material self interest	Social being guided by material self interest, values, ideals, peers
	Implementation of Compliance Strategy	Implementation of Integrity Strategy
Standards	Criminal and regulatory law	Company values and aspirations, social obligations, including law
Staffing	Lawyers	Executives and managers with lawyers, other
Activities	Develop compliance standards Train and communicate Handle report of misconduct Conduct investigations Oversee compliance audits Enforce tandards	Lead development of company values and standards Train and communicate Integrate into company systems Provide guidance and consultation Assess values performance Identify and resolve problems Oversee compliance activities
Education	Compliance standards and system	Decision making and values Compliance standards and system

Sumber: Lynn Sharp Paine, “Managing for Organizational Integrity,” Harvard Business Review, March-April 1994.

Untuk menjalankan strategi integritas secara efektif diperlukan syarat-syarat sebagai berikut (Paine, 1994):

1. *The guiding values and commitments make sense and are clearly communicated*
2. *Company leaders are personally committed, credible and willing to take action on the values they exposure*
3. *The espoused values are integrated into the normal channels of management decision making and are reflected in the organization's critical activities*
4. *The company's systems and structures support and reinforce its values*
5. *Managers throughout the company have the decision making skills, knowledge, and competencies needed to make ethically sound decisions on a day-to-day basis.*

Membentuk Ethical Climate

Ethical climate yang kuat dalam suatu organisasi berhubungan negatif dengan keseriusan pelanggaran etika. Organisasi yang memiliki norma etika yang jelas menyebabkan persoalan etika yang serius jumlahnya lebih sedikit. Disisi lain, iklim etika berhubungan positif dengan keberhasilan menangani persoalan-persoalan etika. Organisasi dengan iklim etika yang kuat cenderung sukses dalam menangani persoalan-persoalan etika (Bartels, et al., 1998).

Dengan mengkombinasikan pendapat-pendapat dari Lawrence et al. (2005) Carrol & Buchholtz (2003), Kinicki & Kreitner (2003) serta Kenneth R. Andrews (1989) maka langkah-langkah dalam membentuk ethical climate dalam organisasi sebagai berikut

Komitmen dan Keterlibatan dari Manajemen Puncak

Dalam membentuk budaya beretika dalam perusahaan maka harus dimulai dari komitmen dan keterlibatan pimpinan puncak, kemudian para manajer dibawahnya. kode etik tertulis adalah langkah berikutnya. Orang-orang yang memiliki komitmen yang sama dapat membuat sanksi formal maupun non formal untuk membatasi atau mengasingkan pihak-pihak yang tidak sejalan (Andrews, 1989).

Pucuk pimpinan harus memberikan sinyal yang jelas kepada para karyawan bahwa persoalan etika harus diprioritaskan dalam segala keputusan dan tindakan dalam organisasi. Konsistensi dalam keputusan dan tindakan merupakan kunci. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan mengundang sinisme dan penolakan terhadap program. Tindakan pimpinan dalam

menjalankan kebijakan moral akan lebih berpengaruh ketimbang kebijakan tertulis. Menurut Martha Clark Goss, VP dan CEO Booz Allen & Hamilton (Andrews, 1989): "Tone at the top is critical-and it's always monkey see, monkey do."

Komitmen manajemen puncak telah memberi warna pada kebijakannya terhadap aturan yang berkaitan dengan etika akademik. Sebagai contoh, pimpinan STIE Perbanas pernah membuat keputusan bahwa pengawas dapat menindak mahasiswa yang terbukti menyontek tanpa memberi peringatan terlebih dahulu. Namun pernah juga kebijakannya adalah memberi peringatan hingga dua kali dengan peringatan tertulis, kemudian pada pelanggaran ketiga baru yang bersangkutan ditindak. Penulis pernah menjadi pengawas ujian akhir, memberi peringatan kepada beberapa mahasiswa yang nakal. Namun penulis merasa dipermainkan dan diremehkan oleh mahasiswa karena kebijakan yang seperti ini. Mahasiswa tidak menunjukkan kekhawatirannya. Jika mereka menyontek pada kali pertama, mereka yakin masih ada kesempatan menyontek lagi sebelum diberi sanksi.

Membuat Kode Etik

Setelah pimpinan menunjukkan komitmen dan keterlibatan yang nyata, maka diperlukan penulisan kode etik secara eksplisit. Kode etik disusun sebagai panduan bagi pejabat, dosen dan karyawan bila menghadapi dilema etika. Kode etik dibuat bersama dengan para karyawan dan dosen serta disampaikan kepada sekluruh karyawan dan *stakeholder*.

Kode etik tidak akan bermakna bila tidak menjadi "*living document*" dan diterapkan dalam kehidupan organisasi. Mc Cabe, Trevino dan Butterfield mengemukakan bahwa studi-studi tentang efektivitas kode etik menunjukkan adanya hubungan antara kode etik perusahaan dengan perilaku karyawan, terutama bila dilaksanakan secara penuh dan menyatu dalam budaya perusahaan. Dengan dilaksanakannya kode etik secara penuh dan menyatu dalam budaya perusahaan, maka berdasarkan laporan, pelanggaran etika oleh karyawan berkurang (Carrol & Buholtz, 2003).

Program Pelatihan

Sebuah kebijakan tidak dapat berjalan efektif bila tidak dipahami. Oleh karena itu diperlukan sesi pelatihan untuk mendiskusikan masalah-masalah dalam penerapan standar etika. Sasaran yang dapat dicapai melalui pelatihan adalah (Carrol & Buholtz, 2003) (1) meningkatkan sensitivitas terhadap persoalan etika, (2) mendorong evaluasi kritis terhadap prioritas nilai, (3) meningkatkan kesadaran terhadap realitas

organisasi, (4) meningkatkan kesadaran terhadap realitas sosial, (5) meningkatkan pemahaman pentingnya citra dan hubungan kemasyarakatan, (6) menelaah aspek etika dalam pengambilan keputusan bisnis, (7) meningkatkan keadilan dan kejujuran di tempat kerja, (8) memberikan respon secara lebih menyeluruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Topik pelatihan etika yang paling penting untuk dikembangkan oleh lembaga pendidikan adalah yang berkaitan dengan *academic integrity*, terutama kepada dosen serta kepada para mahasiswa, sehingga mereka mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan *academic integrity*, bagaimana menerapkannya dalam darma pendidikan dan penelitian.

Menghukum Pelanggar Standar Etika dan Menghargai Ketaatan terhadap Etika

Manajemen harus menghukum para orang yang melanggar etika. Jika hal ini tidak dilakukan, akan mengesankan bahwa manajemen secara implisit menyetujui perbuatan orang yang melanggar etika tersebut dan akan menghambat pembentukan iklim yang lebih beretika. "Tough decisions should not be postponed simply because they are painful. The steady support of corporate integrity is never without emotional cost" (Andrews, 1989)

Disisi lain, ketaatan (*compliance*) terhadap etika perlu dihargai. Manajemen perlu mengintegrasikan penilaian terhadap etika dalam pengukuran kinerja dosen, karyawan serta digunakan dalam pertimbangan promosi.

Pada kedua kasus pelanggaran akademik tersebut, baik mahasiswa yang terlibat, dosen maupun para pengawas oleh Tim Komisi Etik telah direkomendasikan untuk dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kemudian Lembaga memutuskan sanksi yang dikenakan kepada mereka.

Perguruan tinggi seperti UI dan UGM pernah melakukan tindakan terhadap dosen atau para sarjana yang terbukti melanggar etika. Dalam harian Kompas 18 Desember 2002 diberitakan sebagai berikut:

Beberapa waktu lalu seorang dosen UI terbukti menjiplak skripsi mahasiswa S1-nya untuk dijadikan tulisan di sebuah jurnal ilmu pengetahuan. Hal ini memang sarana mencari kredit untuk kenaikan pangkat "Tabelnya sama, gambarnya sama, bahkan bahasanya nyaris sama," ungkap Sardy. Hal yang sama terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pernah ditemukan tesis master menjiplak. Tesis itu dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan dari skripsi mahasiswa yang hanya memperoleh nilai C.

Bahkan, Rapat Senat UGM pernah memutuskan untuk membatalkan gelar "doktor" Drs Syaiful S Azhar MS atau Ipong S Azhar karena kasus plagiat terhadap karya Nurhasim, Februari 2000.

Penulis pernah menemukan skripsi mahasiswa yang hendak diujikan, namun lebih dari 95% sama isinya dengan skripsi mahasiswa STIE Perbanas yang telah lulus sebelumnya. Penulis berhasil mendapatkan skripsi yang menjadi sumber jiplakannya, kemudian melaporkannya kepada Ketua Jurusan. Akhirnya mahasiswa tersebut diskors.

Membuat Unit Urusan Etik

Menurut Kinicki dan Kreitner (2003) etika merupakan urusan sehari-hari, bukan merupakan suatu hal yang sekali diumumkan, kemudian disimpan dan dilupakan. Unit ini mengurus persoalan *ethical compliance* dan pengembangan serta implementasi program etika. Unit ini merancang sistem informasi yang tepat waktu dan akurat terhadap gejala pelanggaran etika. Menerima laporan pelanggaran etik dan menindaklanjutinya, juga merupakan tempat konsultasi bagi para karyawan maupun mahasiswa terhadap persoalan-persoalan etika. Etika akademik dapat diawasi oleh Komisi Etik yang bertanggung jawab kepada Senat. Fungsinya adalah menangani kasus-kasus *academic integrity* sivitas akademika (para dosen dan mahasiswa) serta merekomendasikan tindakan yang diperlukan.

Membangun Academic Integrity

Chapman (2004) mengutip berbagai penelitian yang menunjukkan adanya hubungan terbalik antara kejadian *cheating* dengan penekanan integritas keilmuan yang dilakukan oleh lembaga dan para dosen. Hal tersebut dapat dilakukan melalui (a) sosialisasi kode etik, (b) membentuk kelompok mahasiswa untuk memantau dan mempromosikan kode etik, (c) memberi penekanan terhadap integritas keilmuan pada buku panduan mahasiswa, mengadakan seminar dosen tentang masalah *cheating*, (d) kampanye untuk mengubah persepsi mahasiswa tentang *cheating*, merupakan strategi yang dapat dijalankan untuk mengurangi ketidakjujuran akademik.

Disamping itu, lembaga pendidikan dan para dosen harus memberi penekanan tentang (a) pentingnya integritas keilmuan, (b) menciptakan lingkungan dan suasana saling percaya di kelas, (c) memberi penjelasan tentang tujuan dan harapan lembaga pendidikan kepada para mahasiswa, (d) mengurangi peluang *cheating*, dan (e) mengembangkan standar integritas keilmuan di kampus.

Menurut Williams dan Hosek (2003), jika tidak ada tuntunan moral dan etika, mahasiswa dapat diasumsikan rasional dan mereka akan melakukan *cheating* karena bermanfaat bagi mereka. Sekurangnya mereka mengharapkan dapat menghemat waktu dan usaha dalam mendapatkan nilai. Disisi lain, mereka bukannya tidak menyadari akan adanya risiko ketahuan dan dihukum. Dengan demikian mereka mempertimbangkan manfaat dan biaya (*benefit and cost*) dalam mengambil keputusan.

Nilai-nilai etika juga mereka pertimbangkan. Bila mahasiswa memperkirakan manfaat *cheating* lebih besar dari biayanya, selisihnya itu harus cukup untuk mengatasi kecemasan etika (*ethical qualms*) yang dirasakannya. Bagi orang yang secara ekstrim bermoral, tidak ada manfaatnya melakukan perilaku yang tidak jujur. Pada ekstrim yang lain, orang yang sangat tidak bermoral akan melakukan *cheating* selama manfaat lebih besar dari biayanya. Menurut Williams dan Hosek kebanyakan orang berada di antara dua ekstrim tersebut.

Williams dan Hosek (2003) menyarankan sejumlah rekomendasi untuk mencegah ketidak-jujuran ilmiah. Untuk mengurangi tingkat kecurangan mahasiswa maka lembaga pendidikan perlu melakukan hal-hal berikut.

Mendidik mahasiswa tentang apa itu *Academic Dishonesty*

Lembaga harus menyampaikan informasi kebijakan tentang *academic dishonesty* baik dalam bentuk katalog maupun *website*. Kebijakan ini disosialisasikan kepada mahasiswa pada saat masa orientasi dan mahasiswa menandatangani persetujuan terhadap kebijakan ini beserta konsekuensinya. Kebijakan tersebut dapat berisikan hal-hal berikut (a) membahas tujuan pengutipan dan penyebutan referensi (misalnya agar sesuai dengan standar legal dan etis, meningkatkan kredibilitas karya ilmiah, memberikan informasi bagi yang ingin meneliti lebih jauh, dan lain-lain.), (b) membedakan antara pentingnya menggunakan format yang tepat untuk pengutipan dibandingkan dengan yang tanpa pengutipan sama sekali, (c) memberikan penugasan tentang cara yang benar dalam mengutip bahan pustaka, dan (d) menyampaikan kebijakan *academic dishonesty* dalam silabus.

Mempersulit tindakan *cheating*

Berbagai teknik dapat diterapkan untuk mempersulit *cheating*. Makin sulit melakukan *cheating*, semakin besar upaya yang harus dilakukan (berarti mengurangi manfaat netonya). Teknik-teknik tersebut

antara lain (a) pengawasan ujian langsung oleh dosen, (b) meningkatkan ancaman hukuman jika ketahuan, (c) memberi tugas dengan topik yang spesifik, (d) meminta mahasiswa memberikan *outline* dan *draft* makalah, dan (e) meminta mahasiswa menyertakan bahan penelitian dalam mengumpulkan tugas.

Mengubah iklim toleransi terhadap perilaku tidak jujur

Hal ini dilakukan melalui tekanan dari sesama teman mahasiswa. Berbagai studi menunjukkan bahwa perilaku dapat diubah melalui iklim intoleransi terhadap ketidakjujuran, juga dengan menggunakan peringatan dan penolakan secara sosial. Penolakan sosial akan meningkatkan biaya melakukan perbuatan curang dan menambah kemungkinan terkena hukuman. Di salah satu universitas, koran mahasiswa mengumumkan kasus kecurangan akademik tanpa menyebut identitas pelakunya. Penelitian menunjukkan bahwa faktor kontekstual yang paling mempengaruhi mahasiswa untuk menyontek atau tidak adalah pengaruh teman. Teknik-teknik tersebut antara lain (a) meningkatkan diskusi komunitas tentang isu ini dengan melibatkan para mahasiswa. Bila mahasiswa turut bertanggungjawab dalam menentukan dan menjalankan standar perilaku, maka standar itu akan menjadi budaya kampus, (b) bersama mahasiswa membuat diskusi tentang nilai-nilai etika dan aturan yang dibuat agar mahasiswa berperilaku jujur, dan (c) melibatkan mahasiswa dalam membuat dan menjalankan standar, serta meminta mereka menandatangani hasil kerja mereka.

Memperberat hukuman terhadap ketidakjujuran akademik.

Apabila risiko ketahuan terhadap pelanggaran akademik meningkat dan kepastian hukumannya jelas, hal ini akan mengurangi jumlah pelanggaran akademik. Meningkatnya peluang ketahuan lebih berdampak serta kepastian pengenaan sanksi lebih penting daripada kebijakan memperberat ancaman hukuman. Dengan demikian penting bagi lembaga untuk menyadarkan bahwa komitmen lembaga untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran akademik tidaklah main-main, sehingga mahasiswa akan lebih hati-hati. Mereka betul-betul akan memperhitungkan kemungkinan ketahuan dan hukuman yang bakal diterima. Berbagai strategi yang dapat dilakukan adalah (a) memperberat hukuman bila ketahuan melakukan pelanggaran, (b) meningkatkan kesadaran akan adanya sanksi. Memberi nasihat kepada mahasiswa tentang bagaimana respon dosen dan lembaga

terhadap pelanggaran akademik. Mahasiswa akan menyampaikan hal ini dari mulut ke mulut tentang perilaku yang tidak bisa ditolerir, dan ini akan cukup efisien, dan (c) mengurangi “biaya” untuk melaporkan pelanggaran (*whistleblow*) dengan cara menyediakan prosedur yang sederhana dan hal ini dipublikasikan secara luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran akademik telah mengakibatkan ketidaknyamanan bagi dosen, karyawan administrasi dan mahasiswa yang menjunjung nilai-nilai etika, karena pelanggaran akademik tersebut dapat menyebabkan rusaknya integritas lembaga, merugikan mahasiswa yang jujur serta tak tercapainya nilai-nilai luhur pendidikan. Lembaga pendidikan harus memastikan bahwa ketiga unsur tersebut tidak hanya menaati peraturan yang berlaku tetapi juga menaati nilai-nilai etika.

Kepada karyawan dan dosen perlu diterapkan strategi agar mereka menaati aturan (*legal compliance*) dan nilai-nilai etika (*ethical compliance*). Dengan merujuk pada Gambar 2 di atas tentang Mengapa Karyawan Bertindak Etis, *legal compliance* dilakukan pertama dengan mengumumkan sanksi dan menerapkannya, kemudian memberikan penghargaan kepada karyawan dan dosen yang menaati aturan. Langkah berikutnya adalah menanamkan komitmen dan tanggung jawab pada diri karyawan terhadap keluarga, unit kerja, lembaga, bangsa dan bahkan prinsip-prinsip moral universal.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhadza, A. 2001. *Masalah Menyontek (Cheating) di Dunia Pendidikan*, (Online), (<http://bsi.ac.id/modules.php/themes/rounderx/style/download/download/pengumman/modules.php?name=News&file=article&sid=14>, diakses tgl. 21 Maret 2006).
- Andrews, K.R. 1989. Ethics in Practice. Dalam HBR 2003. *Harvard Business Review on Corporate Ethics* (hlm. 67-83). Boston: HBR.
- Barnett, T. & Schubert, E. 2002. Perceptions of the Ethical Work Climate and Convenantal Relationships. *Journal of Business Ethics*, 36 (3): 279-290.
- Bernardi, R.A., Metzger, R.L., Ryann, G., Bruno, S., Marisa, A. & Hoogkamp, W. 2004. Examining the Decision Process of Students' Cheating Behavior: An Empirical Study. *Journal of Business Ethics*, 50 (4): 397.
- Brown, B.S. & Choong, P. 2005. An Investigation of Academic Dishonesty among Business Students at Public and Private United States Universities. *International Journal of Management*, 22 (2): 201-214.
- Carrol, Archie B. & Ann K. Buchholtz (2003). *Business & Society: Ethics and Stakeholder Management*, 5th edition, Mason, Ohio: South-Western.
- Chapman, K.J., Davis, R., Toy, D. & Wright, L. 2004. Academic Integrity in the Business School Environment: I'll Get by with a Little Help from My Friends. *Journal of Marketing Education*, 26 (3): 236-249.
- Committee on Academic Conduct in the College of Arts and Sciences University of Washington. 2006. *Academic Honesty: Cheating and Plagiarism*, (Online), (<http://depts.washington.edu/grading/issue1/honesty.htm>, diakses 21 Maret 2006).
- De George, R.T. 1999. *Business Ethics* (5th edition). New Jersey: Prentice Hall.
- Ellinger, A.D., Karen, E.W. & Victoria, J.M. 2005. Case Study Research Methods. Dalam R.A. Swanson &

Persoalan etika bukanlah semata-mata persoalan individual, tetapi persoalan yang harus ditangani oleh organisasi. Peran pimpinan dalam melembagakan kode etik sangatlah penting, bahkan menentukan kegagalan ataupun keberhasilan penerapan kode etik tersebut. Pelembagaan etika dalam organisasi dimulai dari komitmen dan keterlibatan pimpinan, baru kemudian diikuti oleh langkah-langkah lainnya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa strategi yang dilakukan bukan semata-mata ketaatan pada aturan, tetapi lebih dari itu adalah ketaatan pada nilai-nilai etika itu sendiri.

Yang paling penting harus dilakukan terhadap mahasiswa adalah pendidikan tentang integritas akademik. Selanjutnya diterapkan strategi pencegahan pelanggaran akademik dengan menggunakan kerangka berpikir biaya-manfaat (*cost-benefit*). Melalui strategi peningkatan risiko terdeteksi dan hukuman yang lebih berat, maka biaya untuk melakukan pelanggaran dari sudut pandang mahasiswa akan semakin tinggi. Diharapkan tindak pelanggaran akademik akan berkurang. Dalam melakukan strategi ini, partisipasi mahasiswa tetap diharapkan, sehingga terbentuk norma sosial bahwa menyontek itu buruk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Imam Wahyudi, Ph.D. yang memberi motivasi dan masukan pada artikel ini.

- E.F. Holton III (Eds.), *Research in Organizations: Foundations and Methods of Inquiry* (hlm. 327-350). San-Francisco: Baerrett-Koehler Publishers, Inc.
- Flinders University. 2006. *Importance of Academic Integrity*, (Online), (<http://www.flinders.edu.au/aims/staff/importance.htm>), diakses tgl. 21 Maret 2006
- Gbadamosi, G. 2004. Academic Ethics: What has Morality, Culture and Administration Got to Do With Its Measurement? *Management Decision*, 42 (9): 1145.
- Hasan, A. 2003. *Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pengetahuan*, (Online), (<http://artikel.us/ambasan.html>), diakses tgl. 15 Januari 2006).
- Kinicki, A. & Robert, K. 2003. *Organizational Behavior: Key Concepts, Skill & Best Practices*. New York: Mc Graw Hill.
- Kimadi. *Substansi Konsep Profesionalisme*, (Online), (http://www.indomarching.net/2005/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=1), diakses tgl. 15 Januari 2006).
- Kompas (online) <http://kompas.com/kompas-cetak/0212/18/iptek/52148.htm> diakses tgl. 21 Maret 2002. *Ilmuwan Indonesia Lakukan Plagiarisme Laporan Akademik STIE Perbanas 2006*.
- Lawrence, A.T., James, W. & James, E.P. 2005. *Business and Society*. New York: Mc Graw Hill.
- Lawson, R.A. 2004. Is Classroom Cheating Related to Business Students' Propensity to Cheat in the "Real World"? *Journal of Business Ethics*, 49 (2): 189.
- Lynn, K.B, Edward, H., Kathryn, M. & Mei, D.S. 1998. The Relationship between Ethical Climate and Ethical Problems within Human Resource Management. *Journal of Business Ethics*, 17 (7): 799.
- Miao-L.F. 2006. Evaluating Ethical Decision-Making of Individual Employees in Organizations-An Integration Framework. *Journal of American Academy of Business*, Cambridge, 8 (2): 105.
- Moeljono, D. 2003. *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nucci, L. 2002. *Moral Development and Moral Education: An Overview*, (Online), (<http://tigger.uic.edu/~lnucci/MoralEd/overview.html#kohlberg>), diakses tgl. 21 Maret 2006).
- O'Connor, T. 2006. *Qualitative Social Science Research Methodology*, (Online), (<http://faculty.ncwc.edu/toconnor/308/308lect09.htm>), diakses 15 Mei 2006).
- Paine, L. S. 1994. Managing for Organizational Integrity. Dalam HBR. 2003. *Harvard Business Review on Corporate Ethics* (hlm. 85-112). Boston: HBR.
- Rahardjo, M.D. 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Sanders, M. 2004. *Plagiarism and Academic Honesty*, (Online), (<http://www.nd.edu/~msander1/plag.html>), diakses tgl. 21 Maret 2006.
- Smith, M.K., Davy, J.A. & Easterling, D. 2004. An Examination of Cheating and Its Antecedents among Marketing and Management. *Journal of Business Ethics*, 50 (1): 63.
- Swanson, R.A. 2005. The Process of Framing Research in Organizations. Dalam R.A. Swanson & Elwood F. Holton III (Eds.). 2005. *Research in Organizations: Foundations and Methods of Inquiry* (hlm. 11-26). San-Francisco: Baerrett-Koehler Publishers, Inc.
- The State University of New Jersey Rutgers. 1997. *Academic Integrity*, (Online), (<http://teachx.rutgers.edu/integrity/policy.html#Integrity>), diakses 21 Maret 2006).
- Tim Komisi Etik STIE Perbanas Jakarta. 2006. *Laporan Investigasi Peristiwa UPM Manajemen Operasional dan UAS TOEFL-EAP*. Jakarta: STIE Perbanas.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi kedua). Jakarta: Balai Pustaka.
- Velasquez, M.G. 2002. *Business Ethics: Concepts and Cases* (5th edition). New Jersey: Prentice Hall.
- Wahyudi, I. 2004. *Symbolism, Rationality and Myth in Organizational Control Systems: An Ethnographic Case Study of Perbanas Business School Jakarta Indonesia*. Unpublished Dissertation. Wollongong: University of Wollongong
- Websters. 2003. *The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language*. Naples, Florida: Typhoon International Corp.
- Wikipedia. 2006. *Integrity*, (Online), (<http://en.wikipedia.org/>) diakses 16 Februari 2006).
- Williams, M.S. & William, R.H. 2003. Strategies for Reducing Academic Dishonesty. *Journal of Legal Studies Education*, 21 (1): 87.
- Wright, T. A. 2004. When a Student Blows the Whistle (on Himself): A Personal Experience Essay on "Delayed" Integrity in a Classroom Setting. *Journal of Management Inquiry*, (13) (4): 289.